

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>. (Diakses 1 Desember 2014).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Budiyanto, Nur. 2013. Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Ditinjau Dari Opini BPK-RI. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Dipublikasikan. Melalui <http://www.google.com> (Diakses 18 Desember 2014).
- Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. <http://Fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>. Diakses tanggal 12 Desember 2014.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaL Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP AkruaL Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju Accrual Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari.
- Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati, dan Heribertus A.P. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-erbasisakrual.pdf>) Diakses tanggal 9 Desember 2014.
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Reviu LKPD.* 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.* 2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2006. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah.* 2007. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2007,.* 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.* 2013. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.* 2003. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

- Satmoko, Nofan. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik. (www.iaiglobal.or.id/tentang_iai_download.php?id=66&kfile=1). Diakses tanggal 9 Desember 2014.
- Simanjuntak, Binsar. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Makalah ini disampaikan dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 9 Desember.
- Sinaga, Jamason. 2005. Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan. <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>. Diakses tanggal 9 Desember 2014.
- Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Widjajarso, Bambang. 2009. Penerapan Basis AkruaL pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. <http://Sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansi-berbasis-akruaLpdf> Diakses tanggal 9 Desember 2014.
- Wijaya, Henryanto. 2008. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005) Untuk Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel. Jurnal Akuntansi/Tahun XII No.3. 313 -323